

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah faktor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan juga merupakan sarana strategis guna peningkatan mutu sumber daya manusia baik dalam pembangunan suatu bangsa maupun dalam tatanan global. Sumber daya manusia menjadi modal dasar sekaligus kekayaan suatu bangsa, sedangkan sumber-sumber modal dan materi merupakan faktor-faktor produksi yang hanya dapat diaktifkan oleh sumber daya manusia. Pendidikan menurut Fattah (2012: 14) menjelaskan bahwa, “pendidikan merupakan rumusan dari sebagai proses pengembangan dari latihan yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), dan kepribadian (*character*), yang diterapkan dalam suatu bentuk formula (persekolahan) kegiatan pendidikan mencakup proses dalam menghasilkan (*production*) dan transfer (*distribution*) ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh individu atau organisasi belajar (*learning organization*)”.

Pendidikan berdasarkan definisi diatas mengandung pengertian yang luas, karena pendidikan terdiri dari unsur-unsur pendidikan yang terkait satu dengan yang lain. Pendidikan merupakan suatu sistem yang saling terkait antara unsur-unsur yang lain. Pengajaran, pengetahuan, peserta didik serta media pengajaran dinamakan unsur-unsur pendidikan. Pendidikan mempunyai pengertian yang luas dari pada pengajaran karena dalam pendidikan tidak hanya ditekankan pada aspek intelektual saja tetapi mencakup proses

pembinaan kepribadian siswa secara menyeluruh. Untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas dalam dunia pendidikan dibutuhkan proses latihan dan pengembangan yang mencakup unsur pengetahuan, keterampilan dan kepribadian.

Terdapat sejumlah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sekaligus merupakan potensi sumber daya pendidikan. Faktor internal berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana. Sedangkan, faktor eksternal berkenaan dengan masyarakat, kebijakan pemerintah, perekonomian, sosial-budaya, politik, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan yang berkualitas sangat membutuhkan anggaran biaya pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan biaya merupakan unsur yang sangat penting. Penentuan besarnya biaya pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Sejumlah biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan pemerintah untuk kelancaran pendidikan adalah pengertian biaya pendidikan menurut Suhardan (2012: 22). Pembiayaan pendidikan menurut Matin (2014; 4) merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar dikelas. Hal ini meliputi perencanaan, anggaran pendidikan, biaya pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan,

akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan.

Secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal seperti yang tercantum dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (SPN). Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan adalah biaya personal. Sedangkan biaya yang meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya merupakan biaya operasi satuan pendidikan.

Ketercapaian tujuan pendidikan yang memerlukan sejumlah investasi dari anggaran pemerintah dan dana masyarakat tergantung pada keuangan dari pembiayaan pendidikan. Investasi tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien serta diarahkan langsung terhadap pencapaian tujuan. Hal ini merupakan kegiatan kepala sekolah untuk mengatur penerimaan keuangan, pengalokasian, dan pertanggungjawaban keuangan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran. Ada 3 kegiatan yang ada dalam pengelolaan biaya pendidikan mencakup tiga hal, adalah: perencanaan biaya pendidikan,

pelaksanaan pengelolaan biaya pendidikan, dan evaluasi pengelolaan biaya pendidikan.

Sekolah merupakan rangkaian komponen yang saling terkait, dan membutuhkan masukan dari lingkungan untuk melakukan proses transformasi serta mengeluarkan hasil. Kebutuhan terhadap masukan dan pengeluaran adalah hal yang tidak dapat dipisahkan lagi, karena antara sekolah, masyarakat dan lingkungan saling ketergantungan. Masukan terhadap sistem sekolah mencakup perangkat lunak, keras, dan manusia yang selaras dengan perkembangan lingkungan. Hal inilah yang akan memberikan konsekuensi dalam proses transformasi sistem sesuai dengan tuntutan lingkungan terhadap keluaran.

Berdasarkan perkembangan dunia dalam bidang pendidikan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Masalah tersebut menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Dan fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah.

Dalam penyelenggaraan biaya pendidikan di sekolah adalah salah satu komponen masukan instrumental input yang sangat penting. Hampir tidak ada pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak akan berjalan tanpa biaya. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam

bentuk uang maupun barang dan tenaga. Ada dua sisi yang saling berkaitan dalam anggaran biaya pendidikan, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Berdasarkan fakta di lapangan yang dilakukan mengungkapkan bahwa sekolah tidak terlepas dari pengelolaan pembiayaan karena dibutuhkan untuk operasional sekolah mulai dari penggajian tenaga pendidik, TU sampai menambah/memperbaiki fasilitas sekolah guna meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah itu sendiri, dan untuk, membiayai kebutuhan sekolah yang lain. Pihak sekolah mengakui bahwa untuk menjalankan itu semua para orang tua diharapkan dapat berpartisipasi dalam melaksanakan tujuan sekolah yang dalam hal ini adalah masalah pembiayaan.

Maka dari itu, dapat dikatakan sentral masalah dalam pengelolaan kegiatan pendidikan adalah pembiayaan pendidikan. Ketidak mampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan pada suatu lembaga. Namun, bukan berarti bahwa apabila tersedia biaya pendidikan yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan sekolah akan lebih baik dan berkualitas. Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), pembiayaan pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Sejauh tercatat dalam Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan.

Sekolah Menengah Pertama yang disingkat dengan SMP merupakan jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat). Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Saat ini Sekolah Menengah Pertama menjadi program Wajar 9 Tahun (SD, SMP). Lulusan sekolah menengah pertama dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan (atau sederajat). Pelajar sekolah menengah pertama umumnya berusia 13-15 tahun. Pendidikan dasar di Indonesia wajib bagi warga negara yang berusia 7 – 15 tahun, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun. Sekolah menengah pertama diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolah menengah pertama negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, sekolah menengah pertama negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada jenjang ini, peserta didik sudah diperkenalkan terhadap materi pembelajaran.; Jenjang ini mengajarkan siswa untuk mulai mempelajari sesuatu secara formal. Jenjang selanjutnya adalah jenjang sekolah menengah pertama. Pada jenjang ini siswa sudah bisa diajak untuk menyelesaikan masalah dalam pelajaran. Jenjang terakhir adalah jenjang sekolah menengah atas atau biasa disingkat SMA. Pada jenjang ini siswa sudah

bisa diajak untuk menggunakan logika dan memilih jurusan sesuai dengan keinginan.

Tingginya biaya pendidikan yang ditanggung orang tua disebabkan banyaknya komponen biaya pendidikan yang menjadi beban orang tua, seperti biaya transportasi bagi siswa, biaya pembelian seragam, pembayaran SPP, dan lainnya. Alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah lebih banyak dialokasikan untuk komponen biaya penunjang, yang menyangkut penyediaan sarana dan prasarana, seperti gaji guru, pengembangan fisik sekolah, serta pengadaan buku pelajaran.

Pengelolaan pembiayaan di SMP Negeri 1 Grobogan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik. Biaya pendidikan di SMP Negeri 1 Grobogan hanya bersumber pada BOS saja, tetapi pencairan dana BOS dari pemerintah sering terjadi keterlambatan untuk mengatasinya dengan cara meminjam tabungan siswa, setelah dana dari pemerintah turun baru dikembalikan kepada pemegang tabungan. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan pembiayaan pendidikan pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, tentu saja pengelolaan pembiayaan cenderung lebih rumit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perencanaan biaya pendidikan di SMP Negeri 1 Grobogan?
2. Bagaimanakah realisasi biaya pendidikan di SMP Negeri 1 Grobogan?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban biaya pendidikan di SMP Negeri 1 Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan biaya pendidikan di SMP Negeri 1 Grobogan.
2. Untuk mendeskripsikan realisasi biaya pendidikan di SMP Negeri 1 Grobogan.
3. Untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban biaya pendidikan di SMP Negeri 1 Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan, penulis mengharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mendalami dan mengembangkan konsep atau teori tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan dan bahan acuan bagi para peneliti berikutnya, terutama yang berminat meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan

penganggaran, pengalokasian, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di sekolah .

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan, pemanfaatan dana secara efisien dan mengalokasikannya secara tepat sesuai dengan skala prioritas sehingga mendukung kinerja yang efektif.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengelolaan biaya pendidikan bagi pengelola satuan pendidikan dan pembuat kebijakan, pengelola sekolah mengelola dana pendidikan secara efisien dan efektif, dan pemerintah pusat dan daerah meningkatkan anggaran pendidikan guna peningkatan mutu pendidikan.